

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN ADIPURA DI KOTA PALU

Silvina Ulfa Merlia; M. Nur Alamsyah; Rusmawaty BTE Rusdin

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; silvinaulfa03@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia;

*Correspondence : silvinaulfa03@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: *Adipura, Collaborative, Governance*

Received. : 05 November 2023

Revised. : 15 Desember 2023

Accepted : 27 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kolaborasi dalam mewujudkan Adipura di Kota Palu, ingin menggunakan teori Ansell dan Gash tentang *Collaborative Governance* dengan empat indikator yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara *purposive* sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Studi ini menunjukkan bahwa berdasarkan keempat indikator, *collaborative governance* untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu menunjukkan bahwa kondisi awal, desain kelembagaan, dan kepemimpinan sudah optimal. Namun, proses kolaborasi belum optimal. Hal ini terlihat pada komitmen dan pemahaman mahasiswa yang masih kurang mendalam. Mahasiswa mengakui bahwa pemahaman mereka tentang Adipura dan isu-isu terkait masih kurang, serta komitmen mereka lebih bersifat individu dan pragmatis, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang tujuan dan konteks dari program kerja mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai kolaborasi yang lebih baik, diperlukan peningkatan dalam pemahaman dan komitmen mahasiswa terhadap Adipura dan isu-isu lingkungan terkait.

ABSTRACT

This research aims to describe the collaboration in achieving the Adipura awards in Palu city. The research utilizes Ansell and Gash's theory of Collaborative Governance, which includes four indicators : initial conditions, institutional design, leadership, and the collaborative process. This study employs a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection techniques include observation, interviews, documentation, and literature review. The research findings indicate that based on the four indicators, the collaborative governance between the City Government and Tadulako University in achieving the Adipura award in Palu City shows that the initial conditions, institutional design, and leadership are already optimal. However, the collaborative process is not yet optimal. This is evident in the commitment and understanding of students, which are still lacking in depth. Students admit that their understanding of Adipura and related issues is still insufficient, and their commitment tends to be individual and pragmatic, without a deep understanding of the objectives and context of their work programs. Therefore, to achieve better collaboration, there needs to be an improvement in the understanding and commitment of student towards Adipura and related environmental issues

Pendahuluan

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat. Di Indonesia,

pemerintah membuat berbagai kegiatan dan program untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau, salah satunya adalah program Adipura. Adipura merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang bertujuan mewujudkan wilayah berwawasan lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan. Penghargaan Adipura diberikan kepada kota-kota di Indonesia yang berhasil meningkatkan kebersihan kotanya.

Untuk meraih Adipura di Kota Palu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pemerintah kelurahan, kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kelompok masyarakat, dan institusi lainnya. kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* dalam Adipura ini sangat mencerminkan adanya *collaborative governance*.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung pemangku kepentingan di luar pemerintahan atau negara, berorientasi pada konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell dan Gash, 2008).

Fokus *collaborative governance* ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai derajat konsensus diantara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* menghendaki terwujudnya keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan publik. Menurut O'Leary dan Bingham (Sudarmo, 2015) kolaborasi merupakan konsep yang menggambarkan proses memfasilitasi dan pelaksanaan yang melibatkan multi organisasi untuk memecahkan masalah yang tidak bisa atau tidak dengan mudah dipecahkan oleh sebuah organisasi secara sendirian. Pendapat ini didukung oleh Bardach (Sudarmo, 2015) yang mendefinisikan *collaboration* sebagai bentuk aktivitas bersama oleh dua institusi atau lebih yang bekerja sama ditujukan untuk meningkatkan "*public value*" ketimbang bekerja sendiri-sendiri.

Kota Palu menghadapi berbagai masalah dalam meraih penghargaan Adipura, seperti rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan masalah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Meskipun pemerintah kota sudah melakukan berbagai upaya seperti pengadaan armada angkut sampah, penerapan perwali tentang pengurangan sampah plastik, lomba kebersihan lingkungan, pembuatan ruang terbuka hijau, dan pembentukan satgas Adipura, nyatanya Kota Palu sempat gagal dalam meraih Adipura.

Pada Tahun 2024, Kota Palu akhirnya berhasil meraih penghargaan Adipura. Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari efektivitas *collaborative governance* yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah kota Palu, melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, bekerjasama dengan pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan, organisasi perangkat daerah, kolompok masyarakat, dan institusi-institusi lainnya, termasuk Universitas Tadulako. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga membuahkan hasil yang konkret dalam bentuk penghargaan bergengsi ini. Keberhasilan ini menjadi contoh inspiratif tentang bagaimana kolaborasi antara berbagai pihak dapat mengatasi tantangan lingkungan yang kompleks dan mencapai tujuan bersama.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu bekerjasama dengan Universitas Tadulako karena Universitas memiliki sumber daya intelektual dan penelitian berharga yang bisa membantu menganalisis masalah lingkungan dan mengembangkan solusi inovatif. Kolaborasi ini juga melibatkan mahasiswa dan masyarakat dalam proyek-proyek Adipura seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama dengan Pemerintah Kota terkait upaya mewujudkan Adipura, Universitas Tadulako melalui Pusat Pengembangan Kuliah Kerja Nyata (PusBang KKN) pada Tahun 2022 menurunkan mahasiswa KKN dengan tema KKN Tematik Palu Adipura. Namun ada tantangan yang perlu dihadapi dalam

kolaborasi ini, banyak mahasiswa Universitas Tadulako yang tidak memahami bagaimana mekanisme kerja terkait Adipura tersebut berjalan, sehingga sulit bagi mereka untuk memahami kesepakatan kolaborasi antara pemerintah kota dan Universitas Tadulako. Dalam konteks pemahaman bersama (*share understanding*) yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, sangat penting bagi semua *stakeholder* yang terlibat untuk saling berbagi pemahaman. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai Adipura menjadi permasalahan karena menghambat tercapainya tujuan kolaborasi ini. Untuk itu studi ini bertujuan mengetahui bagaimana *Collaborative Governance* antara pemerintah kota dan Universitas Tadulako untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu.

Metode

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, dengan dasar penelitian kualitatif. Marsh et al (2021) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknik seperti observasi wawancara, partisipan, wawancara individu, wawancara intensif dan kelompok, yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengalaman serta praktik informan adalah kunci untuk menempatkan dalam konteks sesuai. Jenis data yang terdapat pada penelitian ini terbagi atas dua yaitu, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian pustaka dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disebut *purposive sampling* pengambilan sampel didasarkan pada pertimbangan yang terfokus pada tujuan penelitian, bukan berdasarkan pola acak, regional, atau bertingkat. Sehingga jumlah informan yang penulis tentukan ialah enam informan yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, dua Mahasiswa KKN Tematik Adipura, Perempuan Adipura, Pusat pengembangan Kuliah Kerja Nyata, dan Dosen Pembimbing Lapangan KKN Tematik Adipura yang penulis lihat mampu

memberikan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan dalam studi ini yaitu menggunakan model analisis Milles, Huberman, dan Saldana(2014), yang mencakup pengumpulan data, simplikasi, kondensasi, dan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Model *Collaborative Governance* Antara Pemerintah Kota Dan Universitas Tadulako Untuk Mewujudkan Adipura Di Kota Palu

Kota Palu merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, terletak di antara koordinat 0°35'-0°56' lintang selatan dan 119°0"-120° bujur timur dengan luas wilayah mencapai 395.06 km. Kota Palu terletak di sebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan dilalui oleh sungai yang bermuara di teluk palu. Wilayah kota palu terletak didataran lembah dengan ketinggian yang bervariasi.

Untuk hidup yang sehat, kebersihan lingkungan adalah langkah yang penting. Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kegiatan dan program kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Salah satu program tersebut adalah Adipura, yang merupakan inisiatif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lingkup nasional. Program ini bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang berwawasan lingkungan dan menuju pembangunan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari upaya mendukung program kebersihan lingkungan di Kota Palu, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Tadulako turut terlibat. KKN adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendekatan interdisipliner dan sektoral di waktu dan lokasi tertentu di Indonesia. KKN adalah komponen dari kegiatan intrakurikuler wajib yang menyatukan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui metode belajar dan bekerja untuk pemberdayaan masyarakat. Program ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Universitas Tadulako dan perguruan tinggi lain di Indonesia, di mana mahasiswa

diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan. Kegiatan KKN bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai kondisi masyarakat serta menemukan dan mencari solusi terhadap berbagai permasalahan, yang juga berfungsi sebagai persiapan menuju dunia kerja.

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Adipura dilaksanakan dalam lima angkatan yaitu angkatan 98-102 pada tahun 2022, dengan total mahasiswa sekitar 5.990. kegiatan perkuliahan dilapangan berlangsung selama 30 hari, terbagi dalam 2 hari pertama untuk pembekalan dan pembibingan, 26 hari berikutnya untuk pelaksanaan program dan 2 hari terakhir untuk penyelesaian laporan.

KKN Tematik ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Universitas Tadulako yang bekerjasama dengan pemerintah kota untuk menuju Kota Palu Adipura. Pada KKN ini Walikota Palu memberikan dana 100 juta kepada mahasiswa pemenang program.

Collaborative governance merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam mengukur kerjasama antara *stakeholder* yang terkait dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui satu organisasi secara sendirian. Adapun peneliti menggunakan teori Ansell dan Gash dalam mengukur keberhasilan kolaborasi menggunakan 4 indikator 1) kondisi awal, 2) Desain Kelembagaan 3) Kepemimpinan 4) Proses Kolaborasi.

Kondisi Awal

Sebelum terjadi sebuah proses kolaborasi antara pemangku kepentingan, terdapat kondisi yang melatarbelakangi kerjasama antara pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti adanya kepentingan dan misi bersama di antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang ingin dicapai, saling menghargai hubungan kerja sama yang terjalin, sejarah kerjasama di masa lalu, serta tingkat kepercayaan yang ada di antara para *stakeholders* tersebut.

Terkait kondisi awal dalam kolaborasi untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu dimulai dengan keinginan Walikota Palu untuk memperoleh penghargaan Adipura. Untuk mencapai tujuan ini, inisiatif awal datang dari Ibu Irmayanti Pettalolo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu. Beliau menyadari kebutuhan akan banyaknya sumber daya manusia untuk mensosialisasikan program Adipura kepada masyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, Ibu Irmayanti kemudian mencari tahu apakah mahasiswa Universitas Tadulako bisa diikutsertakan dalam program tersebut melalui KKN. Universitas Tadulako pun bersedia membantu dengan melibatkan lima angkatan dalam satu tahun, masing-masing angkatan terdiri dari sekitar 500 mahasiswa. Dalam kolaborasi ini juga Walikota Palu memberikan rewards 100 juta untuk mahasiswa pemenang program.

Dalam kolaborasi ini diketahui bahwa para *stakeholder* memiliki kepentingan dan visi misi yang sama, serta saling menghargai dalam kerjasama yang terjalin untuk mendukung program pemerintah sepenuhnya. Hal ini menciptakan kondisi yang sesuai dengan teori kondisi awal Ansell dan Gash, dimana terdapat kesamaan tujuan dan kepercayaan yang tinggi di antara pihak-pihak yang terlibat, memungkinkan kolaborasi yang efektif dan lancar dalam mencapai penghargaan Adipura.

Desain Kelembagaan

Pemimpin meminta pihak-pihak terkait untuk terlibat dalam negosiasi dengan sikap yang baik dan menjelajahi kesepakatan, kompromi, dan perolehan bersama. Pendekatan pemerintahan kolaboratif menekankan pada mencapai kesepakatan meskipun mengakui bahwa kesepakatan tidak selalu tercapai. Pertanyaannya adalah apakah semua upaya kolaboratif harus mencapai kesepakatan. Masalah terkait desain institusional, seperti penggunaan batas waktu, dapat melemahkan keberlanjutan kolaborasi dengan tidak sengaja mengurangi intensif bagi kerja sama jangka panjang. Desain kelembagaan berperan dalam menetapkan tata cara dan aturan dasar yang

memastikan bahwa proses kolaborasi dilakukan dengan cara yang legal dan transparan. Ini mencakup pembuatan prosedur yang formal dan peraturan yang mendukung transparansi serta legalitas dalam setiap langkah kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah Kota Palu dan Universitas Tadulako untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu telah memiliki desain kelembagaan yang baik. Sebelum kolaborasi dimulai, meskipun MoU dengan rektor sudah ada sejak lama, tetap diperlukan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang lebih spesifik. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup merespon cepat dengan segera menyusun Perjanjian Kerjasama tersebut, yang kemudian ditandatangani oleh Ketua LPPM dan Walikota.

Hal ini menunjukkan pentingnya aturan dasar dan prosedur untuk kolaborasi yang legal dan terstruktur, memperlihatkan proses tatap muka yang efektif dan respons yang cepat dari semua pihak yang terlibat. Kejelasan peran dan tanggung jawab ini mencerminkan prinsip-prinsip desain kelembagaan dalam kolaboratif Ansell dan Gash, yang menekankan pentingnya transparansi, struktur formal, dan insentif yang mendukung proses kolaborasi yang sukses.

Ansell dan Gash juga menyatakan, Desain kelembagaan berperan dalam menetapkan tata cara dan aturan dasar yang memastikan bahwa proses kolaborasi dilakukan dengan cara yang legal dan transparan. Ini mencakup pembuatan prosedur yang formal dan peraturan yang mendukung transparansi serta legalitas dalam setiap langkah kolaborasi, dimana dalam kolaborasi ini, hal tersebut telah terpenuhi.

Dengan adanya hal tersebut, dapat diketahui bahwa Desain Kelembagaan dalam kolaborasi ini telah berjalan sesuai harapan karena para pemangku kepentingan terlibat dalam negosiasi dengan itikad baik, menjelajahi kesepakatan, kompromi dan keuntungan Bersama.

Kepemimpinan

Peran pemimpin sangat krusial dalam mengajak, memberdayakan, dan

melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan dalam sebuah kolaborasi. Tingginya tingkat konflik dan rendahnya kepercayaan dapat mendorong partisipasi *collaborative governance*, yang bertindak sebagai perantara antara *stakeholder* yang menerima layanan. Kepemimpinan dalam konteks ini akan bervariasi tergantung pada situasi lokal, namun kurangnya kepemimpinan dapat menghambat kemungkinan kerjasama yang efektif. Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam mengorganisasi musyawarah diantara para pemangku kepentingan, menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan memastikan adanya pembagian keuntungan dalam kolaborasi.

Pada kolaborasi ini peran pemimpin atau kepemimpinan sudah sangat baik. Kepemimpinan dalam proses ini dipandu oleh pemimpin dari pemerintah kota dan pihak Universitas Tadulako yang berperan sebagai fasilitator. Pada peran kepemimpinan fasilitatif ini, mereka bertindak sebagai mediator dalam musyawarah antara semua *stakeholder* untuk mewujudkan Adipura. Kolaborasi terkait Adipura diserahkan langsung kepada LPPM Universitas Tadulako, yang menunjukkan adanya pembagian tugas yang jelas dari pihak Universitas Tadulako.

Dalam musyawarah, selain dari pihak Universitas Tadulako, Walikota juga mengundang pihak terkait seperti Camat Dan Lurah untuk membangun kepercayaan dan bermusyawarah mengenai aturan dasar dan item-item penilaian Adipura. Hal ini mencerminkan bahwa kepemimpinan sudah sangat baik karena telah tercermin adanya pendekatan partisipatif dan transparan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kepemimpinan fasilitatif menurut ansell dan gash, bahwa Kepemimpinan fasilitatif berperan dalam mengorganisasi musyawarah diantara para pemangku kepentingan, menetapkan aturan dasar, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan memastikan adanya pembagian keuntungan dalam kolaborasi.

Proses Kolaborasi

Terdapat 5 tahapan dalam proses kolaborasi. Sebelum adanya proses kolaborasi, terdapat faktor-faktor yang terjadi dalam *collaborative governance* untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan. Lalu setelah faktor-faktor tersebut terdapat proses kolaborasi yang diawali dengan dialog tatap muka. Dialog tatap muka merupakan Langkah awal proses kolaborasi diantara para *stakeholder* untuk mewujudkan adipura di Kota Palu. Terkait kolaborasi untuk mewujudkan adipura di Kota Palu tergambar proses kolaborasi dalam dialog tatap muka sesuai Teori Ansell dan Gash, dimulai dengan identifikasi dan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti perwakilan Perempuan Adipura, Dinas Lingkungan Hidup, dan Universitas Tadulako. Kemudian melalui diskusi, mencapai persetujuan bersama. Hal ini tercermin dari pernyataan bahwa program-program tersebut sudah berjalan, menandakan tahap implementasi telah dimulai, dimana pihak-pihak terlibat bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Kedua, Membangun Kepercayaan. Rasa ketidakpercayaan di antara *stakeholder* sering kali menjadi tantangan di awal proses kolaborasi. Kolaborasi bukan hanya tentang negosiasi antar para pihak, tetapi juga melibatkan upaya untuk membangun kepercayaan di antara mereka. Membangun kepercayaan ini sebaiknya dimulai sejak awal proses kolaborasi untuk mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang menyadari pentingnya membangun kepercayaan sebagai bagian integral dari proses kolaborasi. Proses membangun kepercayaan dicapai melalui komunikasi yang terbuka dan transparan antara pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup berbagai informasi mengenai sumber daya yang tersedia, seperti pengetahuan, keterampilan, atau dukungan yang dapat ditawarkan oleh setiap pihak. Jika terdapat permasalahan dalam kolaborasi tersebut, mereka menyelesaikan konflik tersebut diawal awal, hal tersebut menunjukkan pentingnya penyelesaian konflik secara terbuka dan konstruktif dalam mempertahankan kepercayaan. Dengan demikian, dalam kolaborasi tersebut menegaskan bahwa komunikasi, transparansi, dan penyelesaian masalah yang efektif merupakan kunci

dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan diantara semua pihak dalam kolaborasi. Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik merupakan faktor-faktor yang membantu menjaga kepercayaan dalam kerjasama ini. Terkait kepercayaan pada kolaborasi untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu antara Universitas Tadulako dan Pemerintah Kota, kolaborasi ini telah terjalin dengan baik, karena tidak ada masalah atau kendala yang signifikan.

Ketiga, Komitmen. Komitmen memiliki hubungan yang sangat penting dalam proses kolaborasi. Sebagai motivasi untuk terlibat dalam *collaborative governance*, komitmen yang kuat dari semua *stakeholder* diperlukan untuk mencegah berbagai risiko yang mungkin timbul selama kolaborasi. Meskipun komitmen adalah aspek yang kompleks dan menantang dalam kolaborasi, setiap *stakeholder* harus memandang kolaborasi sebagai tanggung jawab baru yang harus dikembangkan dan dikelola dengan baik. Kolaborasi antara Universitas Tadulako dan Pemerintah Kota untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu telah menunjukkan komitmen yang kuat. Hal ini terlihat pada komitmen Universitas Tadulako yang menunjukkan komitmen nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keberlanjutan kota, salah satunya berperan aktif melalui inisiatif kolaboratif, integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk kebersihan lingkungan. Melalui merancang kebijakan bersama Pemerintah Kota, keduanya tidak hanya menetapkan tujuan bersama namun juga memastikan bahwa pendekatan mereka terintegrasi dengan baik, memanfaatkan keahlian akademis dan sumber daya yang dimiliki universitas untuk mendukung implementasi program secara efektif. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya kemitraan strategis antara institusi pendidikan dan pemerintah dalam menjawab tantangan lingkungan, serta komitmen untuk berkontribusi secara positif. Dalam hal ini, selain Universitas Tadulako, Perempuan Adipura juga menyadari pentingnya program ini bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka selalu aktif terlibat dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan. Upaya kolektif ini mendukung visi Kota Palu sebagai kota yang bersih dan berkelanjutan.

Namun, dalam hal ini, meskipun mahasiswa sebagai *stakeholder* penting menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program kerja, komitmen mereka cenderung bersifat individual dan pragmatis, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang tujuan dan konteks dari program kerja mereka.

Keempat, Pemahaman Bersama. Dalam proses kolaborasi, *stakeholder* yang terlibat perlu berbagi pemahaman mengenai apa yang bisa dicapai melalui kolaborasi tersebut. Saling berbagi pemahaman ini dapat berupa berbagai aspek seperti misi bersama, tujuan bersama, visi yang sama, dan ideologi yang serupa. Dengan berbagi pemahaman ini, para *stakeholder* dapat mencapai kesepakatan bersama dalam mengartikan dan memaknai suatu masalah. Terkait kolaborasi untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu, pemahaman bersama tentang program Adipura di Universitas Tadulako diperkuat melalui dua pendekatan utama, yaitu evaluasi rutin dan komunikasi yang efektif. Evaluasi setiap angkatan memastikan bahwa program yang belum terlaksana dapat diperbaiki, sementara komunikasi yang efektif membantu menyelesaikan masalah serta memperkuat pemahaman mahasiswa. Dalam kolaborasi ini juga terlihat bahwa perempuan Adipura juga siap turun bersama mahasiswa dalam program tersebut dan akan memberikan bimbingan serta penjelasan kepada mereka yang memerlukan. Mereka juga menyadari pentingnya himbuan tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui media tertulis seperti selebaran, dengan harapan agar pesan dan tujuan program KKN dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak yang terlibat. Meskipun demikian, terdapat beberapa mahasiswa yang mengakui bahwa pemahaman mereka kurang mendalam tentang program Adipura walupun telah adanya hal tersebut.

Lima, Hasil sementara. Hasil dari proses kolaborasi dapat diwujudkan dalam bentuk output atau keluaran yang nyata, yang merupakan bagian penting dalam mengembangkan momentum untuk mencapai kesuksesan dalam kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul sebagai langkah-langkah yang mungkin dan memberikan manfaat dari kolaborasi, di mana pencapaian "*small wins*" menjadi

sesuatu yang mungkin terjadi. Terkait proses kolaborasi yang dilakukan antara Universitas Tadulako dan pemerintah Kota Palu dalam mewujudkan Penghargaan Adipura telah menunjukkan hasil yang positif. Hasil dari kolaborasi tersebut, tercermin dari penurunan signifikan jumlah tempat sampah liar, yang awalnya berjumlah 712 tempat dan setelah kolaborasi tersebut berkurang menjadi hanya 212 tempat. Penurunan ini menunjukkan efektivitas program sosialisasi dan pendataan yang dilakukan, serta pentingnya kerjasama dalam mengedukasi masyarakat mengenai larangan membuang sampah sembarangan. Dengan adanya kolaborasi ini juga menjadi salah satu pendorong yang berhasil membuat Kota Palu berhasil meraih penghargaan Adipura 2023 yang diserahkan pada Selasa 5 Maret 2024, sebuah pencapaian yang mengakui upaya bersama dalam menciptakan lingkungan kota yang bersih dan sehat. Penghargaan ini merupakan bukti nyata dari efektivitas *collaborative governance* dalam menghadapi tantangan lingkungan dan mewujudkan tujuan bersama.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Model *Collaborative Governance* antara pemerintah Kota dan Universitas Tadulako untuk mewujudkan Adipura di Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa model *Collaborative Governance* ini, menurut teori Ansel & Gash (2007), mencakup empat aspek utama yaitu Kondisi Awal, Desain Kelembagaan, Kepemimpinan dan proses *Collaborative Governance*. Dalam Kondisi awal, kolaborasi ini dimulai dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu, yang memerlukan partisipasi berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah dan akademisi dari Universitas Tadulako. Desain Kelembagaan telah berjalan sesuai harapan karena para pemangku kepentingan terlibat dalam negosiasi dengan itikad baik, menjelajahi kesepakatan, kompromi, dan keuntungan bersama. Kepemimpinan dalam proses ini dipandu oleh pemimpin dari pemerintah kota dan pihak Universitas Tadulako yang berperan sebagai fasilitator

dan pendorong utama dalam berbagai inisiatif lingkungan. Sementara itu dalam Proses Collaborative Governance menunjukkan efektivitas dalam beberapa aspek, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu di perbaiki terutama dalam pemahaman bersama dimana mahasiswa mengakui bahwa pemahaman mereka tentang Adipura dan isu-isu terkait kurang mendalam, mereka lebih fokus pada pelaksanaan tugas tanpa benar-benar mengerti konteks dan permasalahan yang ada, kekurangan lain dalam hal ini yaitu mahasiswa hanya menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan program kerja, namun komitmen mahasiswa lebih bersifat individu dan pragmatis, tanpa disertai pemahaman mendalam tentang tujuan dan konteks dari proker mereka.

Saat ini, Kota Palu telah meraih penghargaan Adipura, yang merupakan bukti nyata bahwa upaya kolaboratif ini telah membuahkan hasil yang positif bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Palu.

Referensi

- Agranoff, R., & McGuire, M. (2003). *Collaborative public management: New strategies for local governments*. Georgetown University Press.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of Cross-Sector collaborations: Propositions from the literature. *Public Administration Review*, 66, 44–55.
- Cahya, N. (2020). Proses Collaborative Governance Dalam Penerapan Uang Elektronik (UNIK) Di Jalan Tol Kota Makassar. *Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Donahue, J. D., & Zeckhauser, R. J. (2011). *Collaborative governance: Private roles for public goals in turbulent times*. Princeton University Press.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). Wicked problems: Implications for public policy and

- management. *Administration & Society*, 47(6), 711–739.
- Jung, Y., Mazmanian, D., & Tang, S.-Y. (2009). Collaborative governance in the United States and Korea: Cases in negotiated policymaking and service delivery. *International Review of Public Administration*, 13(sup1), 1–11.
- Klijin, E.-H., & Koppenjan, J. F. M. (2000). Public management and policy networks: foundations of a network approach to governance. *Public Management an International Journal of Research and Theory*, 2(2), 135–158.
- Kooiman, J. (1993). Modern governance: new government-society interactions. *Modern Governance*, 1–288.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annu. Rev. Environ. Resour.*, 31, 297–325.
- Marsh, D., Stoker, G., & Mahadi, H. (2021). *Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif: Seri Teori dan Metode Ilmu Politik*. Nusamedia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. 3rd. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi Penelitian Kualitatif, the 22nd edition. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Mulyadi, S., Basuki, A. M. H., & Prabowo, H. (2019). *Metode penelitian kualitatif dan mixed method: perspektif yang terbaru untuk ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, dan budaya*.
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. *Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- O’Leary, R., Gazley, B., McGuire, M., & Bingham, L. B. (2009). Public managers in collaboration. *The Collaborative Public Manager*, 1–12.
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149–155.
- Sparrow, J. (2008). New Approaches to Optimizing Child Development And Breaking the Cycle of Poverty. *Brazelton Touchpoints Center*.
- Sugiyono, D. (2013a). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sugiyono, D. (2013b). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Sumarto, S., Suryahadi, A., Arifianto, A., Sadler, K., & Akhmadi, N. (2004). Governance and poverty reduction: Evidence from newly decentralized Indonesia. *Asian Development Experience Vol. 2: The Role of Governance in Asia*, 27–64.

Waardenburg, M., Groenleer, M., de Jong, J., & Keijser, B. (2020). Paradoxes of collaborative governance: investigating the real-life dynamics of multi-agency collaborations using a quasi-experimental action-research approach. *Public Management Review*, 22(3), 386–407.

Widoyoko, E. P. (2012). Teknik penyusunan instrumen penelitian. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 15(1), 1–22.

Dokumen :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014